

**IMPLEMENTASI PASAL 124 PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT  
DAERAH TERHADAP KEPUTUSAN BUPATI  
JEMBER DALAM MENATA BIROKRASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember



**Disusun Oleh :**

**SITI NUR IMAMAH**  
**NIM : 1310111023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2017**

**PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PASAL 124 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER DALAM MENATA BIROKRASI**

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 03 Maret 2017

Tempat : Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.  
Ketua

H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.  
Sekretaris

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.  
Anggota

Mengesahkan  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

Suyatna, S.H., M.Hum.  
NPK : 8809225

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Keputusan Bupati Jember Dalam Menata Birokrasi" dapat selesai tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammad Jember, yang telah memberi izin dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dorongan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir;
3. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membagi ilmunya dari awal saya menimba ilmu disini, juga kepada staf dan karyawan (Pak Budi dan Mbak IImi) terimakasih telah banyak membantu;

4. Bapak, ibu, adik dan seluruh keluarga saya atas cinta, dukungan dan doa yang selalu diberikan sehingga skripsi ini selesai pada waktunya;
5. Teman-teman mahasiswa seperjuangan, atas perhatiannya semoga kita tetap menjalin serta menjaga silaturrokhim diantara kita semua, amin;
6. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian.

Saya menyadari dalam skripsi ini masih belum sempurna, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan demi perbaikan kedepannya. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember , 24 Januari 2017

Siti Nur Imamah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Jenis Penelitian .....	6
1.5.3 Sumber Data .....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.5.5 Teknik Analisis Data .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
2.1 Pengertian Implementasi .....	10

2.2	Negara Hukum.....	11
2.2.1	Pengertian dan unsur-unsur Negara Hukum.....	11
2.2.2	Ciri-ciri Negara Hukum.....	12
2.2.3	Indonesia sebagai Negara Hukum.....	13
2.3	Peraturan Perundang-Undangan.....	14
2.4	Kewenangan.....	15
2.4.1	Pengertian Kewenangan.....	15
2.4.2	Jenis-Jenis Kewenangan.....	16
2.4.3	Diskresi.....	20
2.5	Pengertian Birokrasi.....	22
2.6	Pemerintahan Daerah.....	23
2.6.1	Pengertian Pemerintahan daerah.....	23
2.6.2	Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah.....	26
2.6.3	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	26
2.7	Perangkat Daerah.....	27
2.8	Aparatur Sipil Negara.....	30
2.8.1	Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	30
2.8.2	Jenis dan Status Aparatur Sipil Negara.....	31
2.8.3	Fungsi, Tugas, dan Peraan Aparatur Sipil Negara.....	32
2.8.4	Pengertian Pejabat Pembina Kepegawaian.....	33

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
Implementasi Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Terhadap Keputusan Bupati Jember dalam Menata Birokrasi .....	35
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran-saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Keputusan Bupati Jember Nomor : 821/431/313/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan.
- Lampiran 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Lampiran 3 : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Lampiran 4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.108-6/99 Tentang Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Kepegawaian Sebagai Dampak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Abdullah H Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Fakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. S.H. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamal hidjaz. 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar : Pustaka Refleksi.
- Kansil, C.S.T., Drs. S.H. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Makhfudz, S.H., 2013, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Marbun BN. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ni'matul Huda, S.h.,M.Hum. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung; Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Peter, M.Blau. 2000. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Philipus M Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Priyo Budi Santoso. 1993. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sri Hartini. 2008. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1999 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.108-6/99 Tentang Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Kepegawaian Sebagai Dampak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

### **Sumber internet**

Birokrasi, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Birokrasi>, diakses pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 pukul 18.38 WIB

Bupati Faida Mutasi 13 Jabatan Eselon III radio prosalina FM 101.3 jember <http://www.prosalinaradio.com/2016/09/28/bupati-fada-mutasi-3-pejabat-eselon-iii.html> diakses pada Rabu tanggal 16 November 2016 pukul 14.45 WIB

FKB pertanyakan mutasi pejabat pemkab jember-beritajatim News [http://m.beritajatim.com/politik\\_pemerintahan/2783324/fkb\\_pertanyakan\\_mutasi\\_pejabat\\_pemkab\\_jember.html](http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/2783324/fkb_pertanyakan_mutasi_pejabat_pemkab_jember.html), diakses pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 pukul 15.00 WIB